

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 (selanjutnya disebut Renstra Bappeda Kota Ternate) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bappeda Kota Ternate, maka disusunlah Renstra Bappeda Kota Ternate sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kota Ternate merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Ternate, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Bappeda Kota Ternate untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diamanatkan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan proiritas Bappeda Kota Ternate dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015.

## **C. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ternate Tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

- (10) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
- (11) Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 109);

#### **D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Bappeda Kota Ternate merupakan bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJM Kota Ternate, serta keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Ternate yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate. Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 - 2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011–2015 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011–2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal yang berkesinambungan dalam proses perencanaan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2011–2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
  - C. Landasan Hukum

D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Lainnya

E. Sistematika Penulisan

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III : GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TERNATE

A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : PENUTUP

## **BAB II**

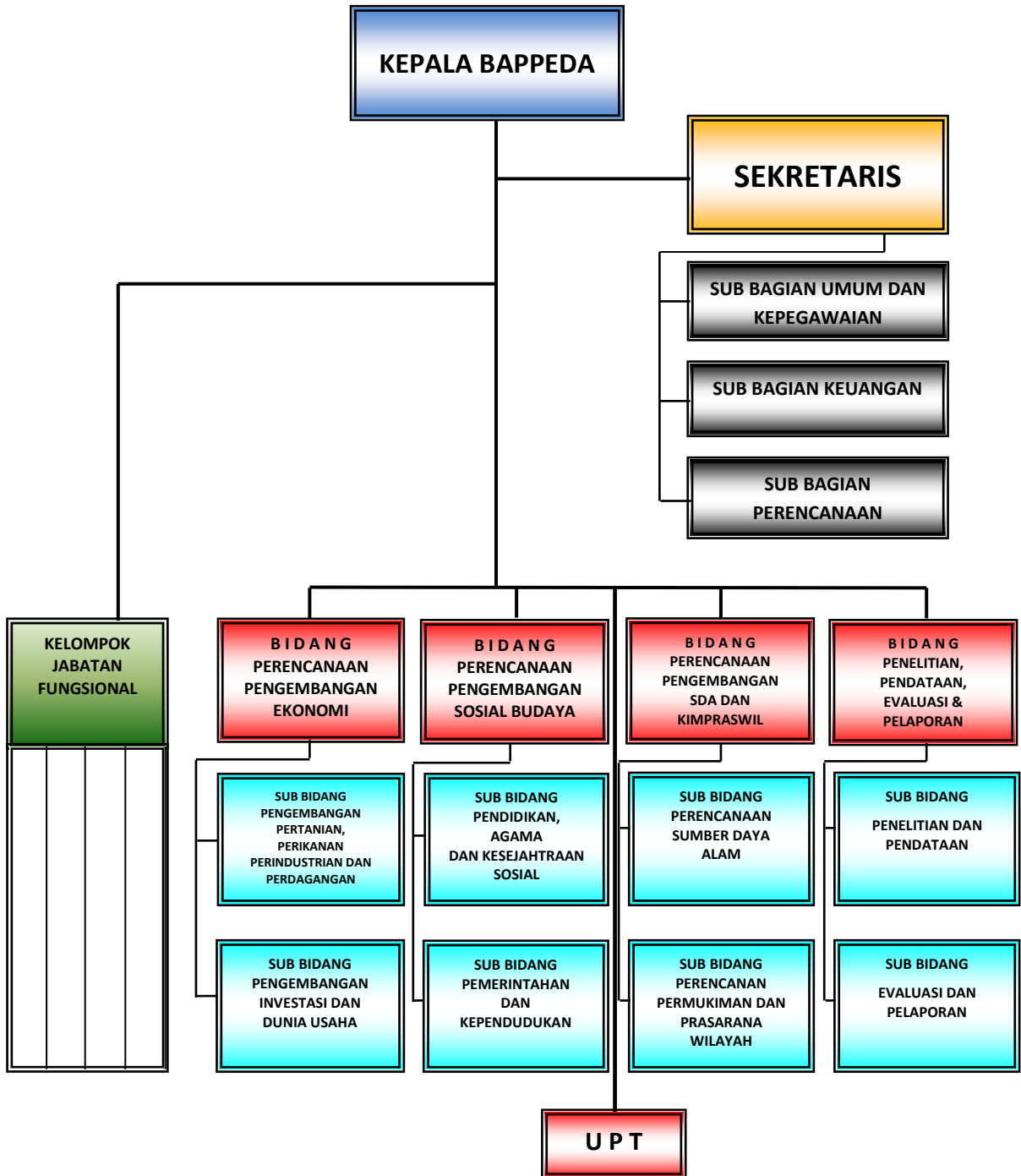
### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **A. Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
    - Sub Bidang Penelitian dan Pendataan
    - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial dan Budaya, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
    - Sub Bidang Pendidikan Agama dan Kesejahteraan Sosial
    - Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
  - c. Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Kimpraswil, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
    - Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
    - Sub Bidang Perencanaan Permukiman dan Prasarana wilayah
  - d. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, yang terdiri dari 2 sub bidang yaitu :
    - Sub Bidang Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan
    - Sub Bidang Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha

**STRUKTUR ORGANISASI  
BAPPEDA KOTA TERNATE**



## **B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

### 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kota Ternate sampai dengan bulan Desember 2010, yang berstatus PNS berjumlah 52 orang dan 17 orang yang berstatus Non-PNS, dengan total keseluruhan pegawai 69 orang, dengan perincian :

1. Golongan IV : 1 orang
2. Golongan III : 37 orang
3. Golongan II : 14 orang
4. Golongan I : - orang

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

1. Strata-2 : 8 orang
2. Strata-1 : 28 orang
3. Diploma-III : 2 orang
4. SMU : 14 orang
5. SMP : - orang
6. SD : - orang

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kota Ternate didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikan Strata-1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut. Untuk diketahui pada tahun 2011 masih terdapat 3 orang PNS di lingkungan Bappeda Kota Ternate, yang sedang mengikuti tugas belajar Program S2.

Dengan demikian banyaknya staf yang meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Bappeda, sehingga diharapkan ke Depan dapat memperkuat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Ternate.

### 2. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Sebagaimana yang diatur ketentuan PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural diharuskan melalui kegiatan



Diklat Penjenjangan seperti ADUM, ADUMLA, SPAMA dan SPAMEN, maka untuk lingkungan Bappeda Kota Ternate, kondisi akhirnya adalah sebagai berikut :

1. SPAMEN : 1 orang
2. SPAMA : 3 orang
3. ADUMLA : - orang
4. ADUM : 6 orang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006, tentang mutasi dan adanya pengurangan jabatan struktural, maka eselon yang ada di Lingkungan Bappeda Kota Ternate terdiri dari :

1. Eselon II/b : 1 orang
2. Eselon III/a : 1 orang
3. Eselon III/b : 4 orang
4. Eselon IV/a : 10 orang

3. Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama / Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Pembelian
1	2	3	4
	<b>Gedung Kantor</b>		
1	Ruang Kerja Kepala	1 ruangan	
2	Ruang Kerja Eselon III	5 ruangan	
3	Ruang Kerja Pegawai	5 ruangan	
4	Ruang Rapat (Auditorium)	1 ruangan	
	<b>Kendaraan Bermotor</b>		
1	Mobil (DG 152 KT)	Taruna	-
2	Sepeda Motor (DG 2026 AK)	Yamaha/Jupiter	2004
3	Sepeda Motor (DG 2081 AK)	Yamaha/Jupiter	2004
4	Sepeda Motor (DG 2094 KT)	Yamaha/Jupiter	2005
5	Sepeda Motor (DG 2291 KT)	Yamaha/Jupiter	2006
6	Sepeda Motor (DG 2290 KT)	Yamaha/Jupiter	2006
7	Sepeda Motor (4 unit)	Yamaha/Jupiter	2007
8	Sepeda Motor (DG 2280 AG)	Honda/Mega Pro	2008
9	Sepeda Motor (DG 2537 KT)	Yamaha/Jupiter	2009
	<b>Jaringan</b>		
1	Jaringan Internet		
2	Instalasi Genset 7 Kw	Honda	2009

1	2	3	4
	<b>Sekretariat</b>		
1	Meja Tulis		2002
2	Printer	HP Laserjet 1000 Series	2002
3	Komputer	LG	2004
4	Ac	LG	2004
5	Dispenser	Uchida	2004
6	Kursi Tangan	Hakari	2006
7	Mesin tik		2007
8	Lemari buku	Marry Star	2007
9	Brangkas		2007
10	Monitor/Display	LG	2007
11	Lemari Makan		2007
12	Jam dinding		2007
13	Rak piring		2007
14	Kamera Digital	Sony 3 MP	2007
15	Handycam		2007
16	Mesin Hitung	Casio	2008
17	Printer	Canon	2008
18	Kursi putar	Kony	2008
19	Laptop	Toshiba	2008
20	Meja Kerja	Active Kerja	2009
21	lemari Arsip		2009
22	CPU	Intel Duo caro	2009
23	Kursi Kerja	Malfin	2009
24	Kursi sofa		2009
25	AC	Panasonic	2009
26	Meja Rapat		2009
27	Kursi Rapat		2009
28	Laptop		2009
	<b>Bidang Fisik Prasarana</b>		
1	Meja Computer	-	2000
2	Meja Computer	-	2000
3	Meja Computer	Brothers	2000
4	Printer	LG	2000
5	Computer	Olimpic	2001
6	Dispenser	Sony	2001
7	Meja Computer	Nasional	2002
8	Kursi Putar	Creative	2002
9	Meja Tulis	Fuji	2002
10	Kursi	Caution	2002
11	Mesin ketik Elektrik	-	2002
12	AC	Olimpic	2002
13	Camera Digital	-	2002
14	Camera Digital	Pro Desing	2002

1	2	3	4
15	Camera	Astek	2002
16	Computer	Astek	2002
17	Laptop	Plimpic	2003
18	Lemari Arsip	Canon 1320	2003
19	Meter Dorong	Canon Fixma	2003
20	Lemari Arsip	Canon 1200	2006
22	Lemari Buku	Mery Star	2007
23	Camera Digital	Digital Zoom Sony	2007
24	Camera Digital	-	2007
25	Flask Disk	-	2007
26	Meteran ( 10 )	-	2007
27	Meteran ( 50 )	-	2007
28	Kursi Putar tangan	Malfin	2008
29	Computer	LG	2008
30	Computer PC	Kony	2008
31	Laptop	Panasonik	2008
32	Printer A3	-	2008
34	Camera Digital	Canon LX 5000	2008
35	Camera Digital	Sony	2008
36	Camera Digital	Sony	2008
37	Camera Digital	-	2008
38	Camera Digital	-	2009
39	Flask Disk	-	2009
40	Meja Kerja	Active	2009
41	Kursi Kerja	Malfin	2009
42	Lemari Arsip		2009
43	AC	Panasonik	2009
	<b>Bidang Sosial Budaya</b>		
1	Lemari Arsip	Hp Desjet 1000	2000
2	Printer	Hp Desjet 920	2000
3	Printer	Verona	2000
4	Kursi Putar	Uchida	2000
5	Dispenser	3M	2000
6	OHP	-	2001
7	Meja Tulis	-	2002
8	Kursi	Sony	2002
9	Handycam	Nokon	2002
10	Camera	Toshiba	2002
11	Laptop	-	2003
12	Lemari Arsip	-	2003
13	Meja Tulis	Pixma IP1000	2005

1	2	3	4
14	Printer	Canon 2100	2006
15	Printer	Marry Start	2007
16	Lemari Buku	-	2007
17	Sofa	-	2007
18	Laptop	-	2007
19	Computer PC	Toshiba	2007
20	Kalkulator	Samsung	2007
21	Mouse	-	2007
22	Meteran ( 50 m )	-	2007
23	Mesin Tik	-	2007
24	Hardisk External	-	2007
25	Laptop	Toshiba	2008
26	Kamera Digital	-	2008
27	Kamera Digital	Sony	2009
28	Kamera Digital	-	2009
29	Meja Kerja	Active	2009
30	Kursi Kerja	Malfin	2009
31	AC	Panasonik	2009
	<b>Bidang Ekonomi</b>		
1	Kursi Tangan	Arinda	2000
2	Lemari Arsip	Olympic	2000
3	Kumputer	-	2000
4	Komputer	-	2000
5	Kipas Angin	Maspion	2000
6	Felling Kabinet	-	2000
7	Mesin Ketik	Brother	2001
8	Komputer	-	2002
9	Kalkulator	Casio	2002
10	Meja Tulis	-	2002
11	Kursi	-	2002
12	Dispencer	-	2002
13	Meja Tulis	-	2002
14	Printer	Canon	2002
15	Lemari Arsip	Sumitra	2003
16	Komputer	-	2003
17	Kursi Komputer	-	2003
18	Kamera Digital	Canon	2005
19	Printer	Canon	2006
20	Mesin Ketik Elektrik	Brother	2006
21	Kamera Digital	Samsung Series	2006
22	Laptop	Acer	-
23	Lemari Buku	Marry Start	2007

1	2	3	4
24	Kursi Rapat	Front Line	2007
25	Laptop	Toshiba	2007
26	Kamera Digital	Sony	2007
27	External Hardisk	-	2007
28	Kursi Putar	Malfin	2008
29	Komputer Note Book		2008
30	Flash Mp3	-	2008
31	Kamera Digital	Sony	2008
32	Mesin Hitung	Casio	2008
33	Printer	Canon	2008
34	Printer	-	2008
35	UPS	Pro - Link	2008
56	Kamera Digital	Niko	2008
37	Kursi Kerja	Malfin	2009
38	Meja Kerja	Active	2009
39	Flash Disk	Klingston	2009
40	Camera Digital	Samsung	2009
41	Camera Digital	Sony Cybershot	2009
42	Mesin Printer	Epson	2009
43	Lemari Arsip	Olympic	2009
44	Ups / Stabilizer	-	2009
45	Mesin Printer	Epson	2009
46	AC	Panasonic	2009
47	Kamera Digital	Sony Chibershot	2010
	<b>Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan</b>		
1	Printer	HP LaserJet 1180 C	2002
2	Printer	HP LaserJet 1000 Series	2002
4	Kursi Putar	Verona	2002
5	CD RW External	Benq	2003
6	Handycam	JVC	2004
7	Lemari Buku	Marry Start	2007
8	Jam Dinding	Great	2007
9	Kamera Digital	Sony 3 MP	2007
10	Jaringan Webside		2007
11	laptop	Tosibha	2007
12	Meja kerja	Sucitra	2007
13	LDC TV	LG	2007
14	Printer	HP	2007
15	Digitizer		2008

1	2	3	4
16	Computer	HP	2008
17	Meja Komputer		2008
18	Printer		2008
20	Meja Kerja	Active	2009
21	Kursi Kerja	Malfin	2009
22	Lemari Arsip	Melody	2009
23	Printe A3		2010
24	UPS Stabilizer		2010
25	Jaring Komputer	Wirreles Bridge Outdoor	2010
26	Jaring Komputer	Acces Point	2010
27	Laptop	Acer	2010

### C. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Ternate

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2008, Bappeda Kota Ternate adalah unsur perencana penyelenggaraan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda Kota Ternate dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) serta dokumen perencanaan lainnya;
5. Penyusunan program-program tahunan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan-perencanaan dengan seluruh perangkat daerah;
7. Penyusunan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
9. Penyusunan database dalam rangka pengembangan dan kelayakan setiap komponen kebijakan, program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan;
12. Penyelenggaraan urusan tata usaha badan;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja yang termuat dalam Peraturan Walikota Daerah No. 24 Tahun 2008, berikut ini akan dijabarkan uraian tugas jabatan struktural dalam lingkup Bappeda Kota Ternate :

**Kepala Bappeda** Mempunyai tugas untuk memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan suatu program dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Badan;
5. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Badan;
6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program tahunan Badan;
7. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Badan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas melakukan penelitian, pengumpulan data dan informasi serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan bidang penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengendalian serta statistik. Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Penelitian, Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Penyediaan data proses pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang lain serta melakukan kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan;
4. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, penyusunan data statistik dan dokumentasi serta penyajian data;
5. Pelaksanaan penelitian serta penyusunan konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Penyusunan daftar skala prioritas usulan rencana program/kegiatan;
7. Penyiapan bahan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan pembangunan serta menyusun hasil evaluasinya;
8. Penyiapan bahan dan data penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
9. Penyusunan produk-produk penunjang perencanaan pembangunan daerah;
10. Pengembangan inovasi baru dalam rangka mencari sistem yang tepat untuk mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi**, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan serta koperasi dan pengembangan dunia usaha. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;



5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya**, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
3. Pelaksanaan pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna memadukan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
6. Pelaksanaan perencanaan pengembangan sosial budaya;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Permukiman dan Prasarana Wilayah**, mempunyai tugas melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, koordinasi dan pembinaan program perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan permukiman

dan prasarana wilayah. Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Pelaksanaan pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Pengembangan SDA dan Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan Bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah serta perumusan langkah-langkah pemecahan masalahnya;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah;
6. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pembangunan bidang sumber daya alam, permukiman dan prasarana wilayah;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TERNATE**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **A. Kondisi Umum Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Saat Ini**

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Ternate terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh Bappeda Kota Ternate dan SKPD terkait.

Sebagai institusi perencana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir produk-produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Publikasi Indikator Ekonomi Daerah Kota Ternate (PDRB dan Inflasi)
2. Penyusunan Buku Ternate Dalam Angka
3. Penyusunan Buku Profil Investasi
4. Penyusunan Buku Monografi
5. Penyusunan LKPJ
6. Penyusunan LPP APBD
7. Penyelenggaraan Musrenbang
8. Penyusunan RKPD
9. Penyusunan KUA-PPAS
10. Penyusunan RPJM Kota Ternate
11. Penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kota Ternate
12. Penyusunan Laporan Tugas-tugas Pembantuan
13. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
14. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi
15. Penyusunan Laporan Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan
16. Evaluasi RPJM Kota Ternate
17. Monitoring dan Pelaporan Realisasi Program / Kegiatan
18. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate
19. Review Program UNICEF dan KHPPIA
20. Revisi RTRW Kota Ternate
21. Penyusunan Standar Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kota Ternate
22. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Kota Ternate
23. Badan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Baru (BKPKKB) Ternate
24. Rapat Konfirmasi Teknis
25. Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan DAK

26. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
27. Tim Koordinasi PNPB-Mandiri Perkotaan Kota Ternate
28. Survey Investigasi Kelayakan Usulan Program/Kegiatan
29. Rencana Induk Investasi Kawasan Kota Baru

## **B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA KOTA TERNATE diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan.
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
6. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
8. Tersusunnya *standard operating procedure* (SOP) perencanaan.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan.

10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Ternate.
11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Visi dan Misi Bappeda**

Visi Bappeda Kota Ternate dirumuskan dengan memperhatikan visi Kota Ternate yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015 :

**Terwujudnya Ternate menjadi Kota "Berbudaya,  
Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan  
dan Berwawasan Lingkungan"**

**\_\_\_\_ KOTA TERNATE "BAHARI BERKESAN" \_\_\_\_**

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Ternate harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu.

Selain menjadi suatu institusi yang handal, Bappeda Kota Ternate juga harus menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Visi Bappeda Kota Ternate yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bappeda Kota Ternate yaitu : :

**"Mewujudkan Bappeda Sebagai Badan Perencanaan Yang Handal Dalam Merumuskan Kebijakan Strategis Kota Ternate"**

Untuk dapat mewujudkan Visi Bappeda Kota Ternate Tahun 2011-2015, ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Menjadikan Bappeda sebagai Pusat data Perencanaan
2. Mengembangkan Paradigma baru perencanaan melalui kebijakan Perencanaan  
*Bottom Up*
3. Mewujudkan kualitas Evaluasi dan Monitoring Perencanaan.



## **B. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Tersedianya data base Kota Ternate yang lengkap, akurat dan *up to date*, dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.
2. Tercapainya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan.
3. Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

## **C. Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan cara yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Merujuk pada Sasaran pelaksanaan Program Prioritas KeLima dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Ternate, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan.
2. Terselenggaranya *Capacity Building* SDM perencanaan pembangunan
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders.

#### **D. Strategi dan Kebijakan**

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi dan kebijakan selama lima tahun ke depan, Renstra Bappeda Kota Ternate menggunakan telaahan *SWOT* . Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

##### **1. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal**

- a. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
  1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.
  2. Adanya jejaring yang telah terbangun dengan baik dengan instansi pemerintah lain
  3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  5. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
  6. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.
- b. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :
  1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan didaerah.
  2. Terdapatnya pertentangan antara peraturan perundangan yang

mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan karena masih terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor dan Bagian.
4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.
7. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perencanaan.

## **2. Identifikasi Faktor Strategi Internal**

- a. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :
  1. Keberadaan Bappeda Kota Ternate sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas.
  4. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Kota Ternate sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
  5. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :
  1. Kelembagaan perencanaan daerah yang belum optimal.
  2. Koordinasi perencanaan antar satuan kerja yang masih lemah.
  3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis *SWOT* diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah Bappeda Kota Ternate melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), maka Bappeda Kota Ternate memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun Bappeda Kota Ternate memiliki peluang dan kekuatan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan.

## **1. Strategi**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kota Ternate sesuai dengan strategi Program Prioritas kelima dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi
2. Melaksanakan *Capacity Building* SDM perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders.

4. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

## **2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Ternate yang ditempuh melalui :

1. Meningkatkan koodinasi, baik internal maupun eksternal, yang berkesinambungan dalam proses perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal untuk jenjang yang lebih tinggi, pendidikan dan diklat, bimbingan teknis, kursus dan pengikutsertaan pada forum-forum seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kelembagaan yang memadai serta memantapkan jaringan (*networking*) informasi perencanaan, evaluasi dan monitoring.
4. Mewujudkan proses pemantauan dan evaluasi yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif.



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjadikan Bappeda sebagai Pusat data Perencanaan	Tersedianya data base Kota Ternate yang lengkap, akurat dan <i>up to date</i> , dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan serta basis data perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi	Meningkatkan koodinasi, baik internal maupun eksternal, yang berkesinambungan dalam proses perencanaan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Pengembangan data/informasi
2	Mengembangkan Paradigma baru perencanaan melalui kebijakan Perencanaan <i>Bottom Up</i>	Tercapainya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan perencanaan pembangunan	Terselenggaranya <i>Capacity Building</i> SDM perencanaan pembangunan	Melaksanakan Capacity Building SDM perencana pembangunan	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal untuk jenjang yang lebih tinggi, pendidikan dan diklat, bimbingan teknis, kursus dan pengikutsertaan pada forum-forum seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya.	1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Mewujudkan kualitas Evaluasi dan Monitoring Perencanaan	Terwujudnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kebijakan pembangunan daerah	1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan 2. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholders	1. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders 2. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kelembagaan yang memadai serta memantapkan jaringan ( <i>networking</i> ) informasi perencanaan, evaluasi dan monitoring. 2. Mewujudkan proses pemantauan dan evaluasi yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif.	1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 4. Program perencanaan pembangunan ekonomi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7
						5. Program perencanaan sosial budaya 6. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 7. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana



## BAB V

### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Ternate. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran 11 Program Prioritas Visi BAHARI BERKESAN, dengan mengedepankan aspek perencanaan dalam ketersediaan pada :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.

**I. Sasaran Strategis** : Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era goblisasi, dengan Program :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  12. Penyediaan Makanan dan Minuman
  13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  14. dst..
- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  8. dst..
- C. Program Pengembangan data/informasi, dengan rincian kegiatan antara lain :
1. Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
  2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
  3. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanann pembangunan kawasan rawan bencana
  4. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
  5. Penyusunan profil daerah
  6. Pembuatan Website Bappeda Kota Ternate
  7. dst..

**II. Sasaran Strategis** : Melaksanakan Capacity Building SDM perencana pembangunan, dengan Program :

A. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah (kursus perencanaan)
4. dst..

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
2. Penyusunan rancangan RPJPD
3. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
4. Penetapan RPJPD
5. Penyusunan RPJM Tahun 2011-2015
6. Penyelenggaraan musrenbang tahunan tahun 2011 sampai tahun 2015
7. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
8. Penetapan RPJM Tahun 2011-2015
9. Penyusunan rancangan RKPD
10. Penyelenggaraan forum SKPD
11. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
12. Penetapan RKPD
13. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemda
14. Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
15. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16. dst..

**III. Sasaran Strategis** :

1. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders
2. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan

dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dengan Program :

- A. Program Kerjasama Pembangunan, dengan rincian kegiatan antara lain :
  1. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
  2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
  3. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
  4. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
  5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  6. dst..
- B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, dengan rincian kegiatan antara lain :
  1. kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  2. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
  3. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  4. Penyusunan, perencanaan dan pengembangan kota baru
  5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  6. dst..
- C. Program Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, dengan rincian kegiatan antara lain :
  1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
  2. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
  3. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
  4. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
  5. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
  6. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
  7. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga
  8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  9. dst..

D. Program perencanaan pembangunan ekonomi, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan *master plan* pembangunan ekonomi daerah
2. Penyusunan Indikator ekonomi daerah
3. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Penyusunan Tabel input output daerah
6. Penyusunan Monografi Kota Ternate
7. Penyusunan Ternate Dalam Angka (Kerjasama dengan BPS)
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. dst..

E. Program perencanaan sosial budaya, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyusunan *master plan* pendidikan
2. Koordinasi penyusunan *master plan* kesehatan
3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. dst..

F. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyusunan *master plan* pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. dst..

G. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana
2. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. dst..

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda Kota Ternate yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Kota Ternate, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Rencana Strategis Bappeda Kota Ternate ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda Kota Ternate memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kota Ternate serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate dan bersifat indikatif.

Renstra Bappeda Kota Ternate ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah/Kepala Bappeda Kota Ternate. Rencana Strategis Bappeda Kota Ternate merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Ternate. Renstra Bappeda Kota Ternate merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kota Ternate maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kota Ternate sangat bergantung pada komitmen jajaran Bappeda Kota Ternate dalam melaksanakan

rencana strategis jawab, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kota Ternate ini dengan penuh tanggung jawab.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2011–2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Kota Ternate dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

**KEPALA BAPPEDA KOTA TERNATE**

**SAID ASSAGAF, SH., MM**  
**NIP. 19610413 199008 1 001**



## **KEPALA BAPPEDA KOTA TERNATE**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TERNATE**

**NOMOR : 050.13 / 151 / BAPP-KT / 2011**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2011-2015**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA TERNATE TAHUN 2011**